

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syari'ah yang banyak kita temui di masyarakat. BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil. Masyarakat tertarik dengan BMT karena BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dipercaya menerapkan prinsip syariah dan mampu melayani bisnis dalam skala kecil (Adnan, Widarjono dan Hendrianto, 2003). Menurut laporan pengurus BMT yang difasilitasi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (untuk selanjutnya disingkat dengan PINBUK), berbagai praktek rentenir hilang dan lenyap. Hal ini dikarenakan BMT berhasil memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah dan tidak memberatkan pengusaha kecil.

Studi kasus pada beberapa BMT terbaik di Jawa Tengah seperti BMT Ben Taqwa di Grobogan Purwodadi, BMT Bintoro Madani di Demak, BMT Tumang di Cepogo Boyolali dan BMT Pekajangan di Klaten membuktikan bahwa BMT dapat mempertahankan usahanya karena mampu menjaga kepercayaan masyarakat (Aziz dalam Mu'alim, 2005), maka dari itu BMT harus diakui sebagai lembaga keuangan non formal yang sukses dalam menjalankan fungsi *financial intermediary* yaitu sebagai media yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya sistem perbankan di Indonesia. Perbankan secara teknis belum menyentuh Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional. Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hanya melayani masyarakat atau bisnis menengah ke atas (Adnan, Widarjono dan Hendrianto, 2003). BMT yang berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah memanfaatkan peluang ini dengan memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah dan tidak memberatkan pengusaha kecil sehingga diharapkan BMT dapat menjadi penyokong tumbuhnya perekonomian UMK.

Peraturan/landasan hukum yang digunakan BMT masih beragam. Pertama mengenai kelembagaan, pendirian BMT didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 538/PKK/IV/1997 yang dikeluarkan tanggal 14 April 1997 tentang status badan hukum lembaga keuangan syariah. Kedua, norma-norma yang mengatur keanggotaan BMT diatur oleh hukum islam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketiga, pengaturan tentang modal awal dan simpanan anggota diatur oleh Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Keempat, fungsi baitul maal (bendahara) diawasi oleh UU nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Kelima, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang

petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Maka dari itu semakin jelas bahwa kegiatan usaha jasa keuangan syariah perlu ditumbuhkembangkan. Salah satu yang umum dikenal sebagai KJKS adalah BMT yang sekarang ini telah tersebar di masyarakat.

Dalam satu dasawarsa pertama (1995 - 2005), BMT di Indonesia telah tumbuh dan berkembang lebih dari 3.300 BMT dengan aset lebih dari Rp 1,7 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberikan pinjaman terhadap 1,5 juta pengusaha kecil. BMT sebanyak itu telah mempekerjakan tenaga pengelola sebanyak 21.000 orang. (Data PINBUK, 2005). Menurut data Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO) hingga akhir Desember 2006 terdapat 3.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah aset mencapai 2 triliun rupiah dan akhir 2007 jumlah BMT mencapai 4000-an.

BMT sebagai salah satu bidang usaha yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara (*Agent of development*) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesuksesan BMT dipengaruhi oleh banyak aspek, diantaranya aspek manajemen, sumber daya manusia, pemasaran dan kondisi keuangan yang dimilikinya. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui gambaran kesuksesan BMT dilihat dari aspek keuangannya. Penelitian tentang BMT pernah dilakukan oleh Situmorang (2007), dalam penelitiannya Situmorang menyimpulkan angka-angka pertumbuhan dapat mencerminkan tingkat perkembangan

kinerja BMT yang sesungguhnya. Pertumbuhan aset yang terus menerus menjadikan BMT tumbuh semakin besar dan dipercaya oleh masyarakat.

Adnan, Widarjono dan Hendrianto (2003), dalam penelitiannya menyimpulkan kinerja BMT yang baik dapat dilihat dari pertumbuhan total aset, jumlah penabung/pelanggan dan total pembiayaan yang dilakukan. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh empat faktor penting yaitu gaji manajer, jenjang pendidikan, kemampuan manajer dan kemudahan dalam mengaplikasikan produk untuk mencapai tujuan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Mualim dan Abidin (2005), dalam penelitiannya menyimpulkan tolok ukur profesionalisme praktisi BMT ditentukan oleh penguasaan konsep keuangan syari'ah, baik secara teoritis maupun praktis bukan dimaknai dalam konteks kualitas pelayanan yang diberikan oleh BMT terhadap nasabahnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Situmorang (2007), Adnan, Widarjono, Hendrianto (2003) dan Mualim dan Abidin (2005) adalah objek penelitian yang hanya meliputi 3 wilayah kabupaten yaitu Sukoharjo, Solo dan Karanganyar serta masalah dibatasi pada kinerja keuangan BMT saja. Sedangkan dalam penelitian Situmorang (2007), BMT yang diteliti meliputi 9 provinsi di Indonesia yaitu Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan serta permasalahan yang diteliti meliputi kinerja kelembagaan dan keuangan BMT. Dalam penelitian Adnan, Widarjono dan Hendrianto BMT yang diteliti meliputi 47 BMT

yang ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Yogyakarta serta permasalahan yang diteliti meliputi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja BMT yang baik. Dalam penelitian Muallim dan Abidin (2005) yang diteliti adalah praktisi BMT di wilayah Yogyakarta sebanyak 20 orang dengan permasalahan meliputi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *profesionalisme* praktisi dalam menjalankan BMT.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana struktur permodalan BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar ?
2. Bagaimana likuiditas BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar ?
3. Bagaimana efisiensi BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar ?
4. Bagaimana rentabilitas BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar yang meliputi struktur permodalan, likuiditas, rentabilitas dan efisiensi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja keuangan BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar untuk dijadikan evaluasi dalam perbaikan kinerja Koperasi BMT berikutnya baik oleh Pemerintah maupun BMT itu sendiri.
2. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu

Bab I : Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori

Bab II berisi literatur yang relevan mengenai kinerja keuangan, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, baitul maal wat tamwil (BMT), lembaga keuangan mikro syariah dan kerangka teoritis.

Bab III : Metode Penelitian

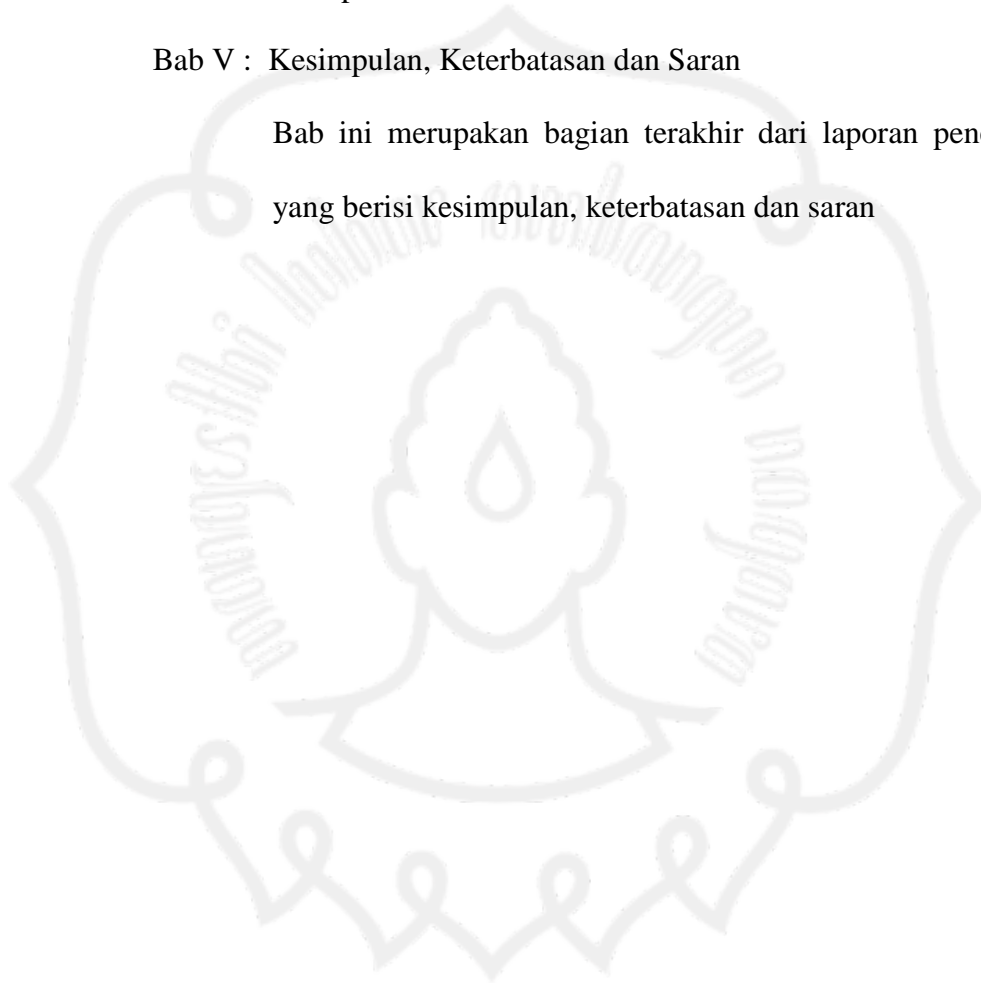
Bab III menguraikan metodologi penelitian yang mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan metode analisis data.

Bab IV : Analisis Data

Bab IV berisi analisis data dan hasil penelitian, yang merupakan analisis penelitian yang membahas deskripsi data, statistik deskriptif, analisis kinerja keuangan dan pembahasan hasil penelitian

Bab V : Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian, yang berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja Keuangan

Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. Penilaian kinerja merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain adalah digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan (Sucipto, 2003).

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif. Kinerja keuangan dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Informasi pertumbuhan kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada serta berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Kinerja keuangan berguna untuk menilai kondisi keuangan BMT. Kondisi keuangan BMT dapat dicerminkan dari tingkat likuiditas, struktur

permodalans, rentabilitas dan efisiensi BMT yang bersangkutan. Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT. Tingkat kesehatan BMT dapat dilihat dari faktor-faktor penting yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan dan keberlangsungan usaha BMT baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang (PKES, 2008).

Pedoman Penilaian Kesehatan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK tahun 1995 menyatakan ada dua aspek utama dalam menilai kesehatan BMT yaitu :

1. Aspek jasadiyah

Aspek jasadiyah kesehatan BMT meliputi :

- a Kinerja keuangan

Kemampuan BMT dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian dan penempatan dana (uang) dengan baik, teliti, cerdas, dan benar sehingga menjamin keberlangsungan lancarnya arus dana di dalam mengelola kegiatan simpan pinjam BMT dan meningkatkan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Sumiyanto (2008) untuk mewujudkan kinerja keuangan BMT yang baik diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan arus kas

Pengelolaan arus kas BMT dilakukan dengan merencanakan dan memonitor secara periodik aliran kas

sesuai dengan kegiatan transaksinya. Hal ini dimaksudkan supaya BMT senantiasa dalam posisi sehat dan mampu memenuhi kewajiban yang berkembang dalam pelayanan kepada anggotanya.

2. Mengelola aset

Dalam mengelola dana dalam bentuk produk *funding* (penghimpunan dana), BMT harus mampu menyediakan dan menyalurkan produk *lending* (penyaluran dana) yang menguntungkan sehingga BMT mampu membayar beban bagi hasil simpanan anggota secara tepat jumlah dan tepat waktu. Agar penghimpunan dan penyaluran dana dapat dilakukan dengan baik maka harus dilakukan dengan pendekatan laporan keuangan yang meliputi aset manajemen, likuiditas manajemen dan kapital manajemen.

3. Menjaga likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan BMT dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayarnya. Bagi BMT, likuiditas merupakan hal yang penting karena menyangkut kepercayaan dan menjadi ukuran dari kesehatan usaha BMT. Jika suatu usaha laba terus menerus tetapi likuiditasnya menunjukkan kurang sehat maka usaha tersebut dapat dikatakan pailit. Sebaliknya suatu usaha meskipun dalam beberapa tahun mengalami kerugian

namun selama likuiditasnya masih mampu menjamin beroperasinya usaha maka usaha tersebut dapat dinyatakan layak untuk dijalankan.

4. Menyusun Laporan Keuangan

Laporan keuangan BMT untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan. Hal ini sangat penting terutama dalam membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Aspek Ruhiah.

Aspek Kesehatan Ruhiah BMT meliputi :

a Visi dan misi BMT

Sejauh mana pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggota memiliki komitmen dan semangat perjuangan terhadap usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat.

b Kepekaan sosial

Sejauh mana para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggota memiliki kepekaan terhadap kualitas hidup masyarakat sehingga akan memunculkan kesadaran yang tinggi untuk membela kepentingan bersama.

c Rasa memiliki yang kuat

Rasa memiliki dan perhatian yang besar terhadap kemajuan maupun kemunduran BMT. Rasa memiliki dapat tumbuh dan berkembang jika BMT menunjukkan prestasi-prestasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

d Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

Pemberlakukan aturan-aturan dalam operasi BMT sesuai dengan al qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 101 paragraf 8).

Informasi dalam laporan keuangan akan berguna bagi pemakai jika memenuhi syarat-syarat kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hanya menyajikan

informasi yang bersifat keuangan dan terjadi di masa lalu. Informasi non keuangan tidak disajikan dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IAI.

2. Fungsi Laporan Keuangan BMT

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT, laporan keuangan BMT yang disusun harus berfungsi sebagai:

- a. Bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai hasil kerja dan prestasi BMT.
- b. Bagian dari sistem pelaporan keuangan BMT yang ditujukan untuk pihak eksternal.
 - 1) Mengetahui prestasi BMT yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota selama satu periode.
 - 2) Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki BMT, kewajiban dan kekayaan bersih (ekuitas) BMT.
 - 3) Mengetahui besarnya promosi ekonomi anggota yang dihasilkan oleh BMT selama satu periode.
 - 4) Mengetahui transaksi/kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam satu periode.
 - 5) Mengetahui informasi penting lainnya untuk mengetahui keadaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang

(likuiditas dan solvabilitas) serta prestasi BMT dalam melayani anggota.

3. Komponen Laporan keuangan BMT

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT, komponen laporan keuangan BMT terdiri dari:

a. Neraca

- 1) Neraca harus menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas BMT pada waktu tertentu.
- 2) Penyajian pos aktiva dan kewajiban dalam neraca BMT tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh temponya.

b. Laporan laba rugi (Perhitungan SHU)

Laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha BMT pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama BMT dan operasi lainnya.

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada BMT selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

- 1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BMT.
- 2) Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.
- 3) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BMT.

d. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal BMT yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

e. Laporan promosi ekonomi anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota BMT selama 1 tahun tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota mencakup:

- 1) Manfaat ekonomi dari kegiatan jasa keuangan syariah lewat BMT.
- 2) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU.

f. Laporan perubahan dana investasi terikat mudharabah muqayyadah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana/mitra usaha (*shahibul maal*) dan pengelola dana, yaitu BMT (*mudharib*) dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau

kerugian) menurut kesepakatan dimuka dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

- g. Laporan sumber dan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah
- 1) Laporan sumber dan penggunaan ZIS merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu.
 - 2) Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pembayar zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan syariah.
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana qardh
- 1) Laporan sumber dan penggunaan qardh merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo qardh pada tanggal tertentu.
 - 2) Qardh merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.
- i. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum BMT, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

4. Pemakai Laporan Keuangan BMT

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT, pengguna laporan keuangan BMT adalah:

- a. Pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
- c. Pembayar zakat, infak dan shadaqah
- d. Anggota BMT
- e. Otoritas pengawasan
- f. Kementerian Koperasi/ Dinas yang membidangi Koperasi
- g. Pemerintah
- h. Masyarakat

C. Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. (Munawir, 2004)

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada

penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. (Munawir, 2004)

Rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis dan menilai posisi keuangan dan kemajuan BMT adalah

a. Struktur permodalan

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha. Keseimbangan dalam penggunaan dana atau permodalan selalu dilakukan dalam setiap periode agar kelancaran usaha dapat dijaga.

Struktur permodalan adalah kemampuan BMT dalam menyediakan sejumlah modal tertentu secara aman dan seimbang untuk mengatasi penarikan dana segera atau sering disebut dengan simpanan sukarela. Struktur permodalan BMT diukur dengan membagi modal dengan simpanan sukarela. Semakin besar porsi modal dibandingkan dengan simpanan sukarela akan lebih baik struktur permodalan BMT sehingga tingkat keamanan dana anggota semakin terjamin. Dengan kata lain semakin tinggi rasio struktur permodalan BMT maka semakin kuat kemampuan BMT dalam mengatasi penarikan dana segera.

b. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan lembaga keuangan dalam menyediakan alat-alat likuidnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayarnya (Mulyono:1996). Kegiatan BMT pada dasarnya mengatur pola aliran uang masuk dan aliran uang keluar

yang tidak mengalami masalah. BMT sebagai bisnis kepercayaan dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan baik. Kegagalan BMT dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akan menurunkan kepercayaan masyarakat.

PINBUK mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan BMT dalam menyediakan dana lancar (kas dan bank) setiap saat untuk mengatasi penarikan tabungan sukarela/jangka pendek anggota. BMT dinilai sehat apabila memiliki dana dalam jumlah yang aman, tidak terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kalau ada yang menarik dana, dan juga tidak terlalu besar sehingga *mubazir* (sia-sia) karena tidak terputarkan dalam pembiayaan.

Rasio likuiditas merupakan alat untuk menganalisis kondisi keuangan dalam jangka pendek. Bagi pihak di luar BMT seperti kreditor jangka pendek dan pihak lain yang berkepentingan dengan BMT, rasio ini menggambarkan kinerja dan tingkat kesehatan BMT. Bagi pihak manajemen, analisis dengan rasio ini bermanfaat untuk mengecek efisiensi modal yang telah dipergunakan oleh BMT.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan BMT untuk mengukur kinerja manajemen dalam menggunakan semua faktor produksinya secara tepat guna dan berhasil guna. Efisiensi dapat dilihat dari bagaimana BMT mengendalikan biaya operasional, sehingga semakin kecil

pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional maka semakin baik efisiensi BMT.

Efisiensi BMT dapat diukur dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya. Semakin rendah rasio efisiensi berarti semakin efisien BMT dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh BMT akan semakin besar.

d. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan BMT dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan informasi penting bagi berbagai pihak.

Rentabilitas BMT diukur dengan membagi laba dengan harta. Semakin besar rasio rentabilitas berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BMT dan semakin baik pula posisi BMT dalam penggunaan aset.

D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Menurut PKES (2006) pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan

bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat, martabat dan membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan dengan prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam* (keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan).

Definisi BMT menurut PINBUK adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu *Baitul Maal* (rumah dana) dan *Baitul Tamwil* (rumah usaha). *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana *Baitul Maal* diperoleh dari zakat, infak, dan sodhaqoh atau sumber-sumber lain yang sifatnya halal, selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada *mustahik* (orang-orang yang berhak menerimanya) dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya *profit oriented*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan para anggota atau simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk

pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah (Widodo dalam Astuti, 2007).

2. Asas dan Landasan BMT

BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme (Ridwan, 2004).

3. Sifat, peran dan fungsi BMT

BMT bersifat terbuka, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Menurut PKES (2006) peran dan fungsi BMT adalah sebagai berikut :

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sitem ekonomi syari'ah.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah dan *salam*.

Fungsi BMT di masyarakat adalah

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, *salam* (selamat, damai,

sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan hidup.

- b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

4. Prinsip Operasional BMT

BMT dalam melaksanakan usahanya berpegang teguh pada prinsip. Prinsip tersebut merupakan perilaku lembaga BMT yang menjiwai dalam mengaplikasikan akad-akadnya di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Menurut Ridwan (2004) prinsip-prinsip BMT tersebut antara lain:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam di dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan antara zikir, fikir dan ukir yaitu keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan.

- c. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yaitu tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan semangat yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar guna mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

5. Produk BMT

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Simpanan adalah merupakan simpanan anggota kepada BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya (Ridwan:2004).

Bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT berupa simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu, sehingga bentuk simpanan di BMT adalah sangat beragam sesuai kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Dalam PINBUK simpanan tersebut dapat digolongkan

- 1) Simpanan pokok khusus yaitu simpanan pendiri kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT.
- 2) Simpanan pokok yaitu simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika menjadi anggota yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar BMT.
- 3) Simpanan wajib yaitu simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa secara berkala yang besar dan waktu pembayarannya ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 4) Simpanan Sukarela
 - a). Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota selain simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - b). Simpanan sukarela dapat disetor dan ditarik sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam anggaran rumah tangga dan aturan khusus BMT.
 - c). Simpanan sukarela dibedakan menjadi :
 1. Simpanan sukarela biasa yaitu simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu sesuai aturan yang ditetapkan.

2. Simpanan sukarela berjangka yaitu simpanan yang hanya dapat ditarik pada waktu yang telah disepakati.

Pada umumnya akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad wadi'ah dan mudarabah berdasarkan fatwa Dewan. Syariah Nasional No. 02/DSN - MUI/IV/2000 dan No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000.

- 1). Simpanan wadi'ah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh pemiliknya atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya.

Simpanan yang berakad wadi'ah ada dua macam :

- a). Wadi'ah amanah. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- b). Wadi'ah yad damanah. Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini pihak penerima titipan (BMT) mendapat hasil dari pengguna dana. Pihak penerima titipan (BMT) dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

- 2). Simpanan Mudarabah yaitu simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan mudarabah berdasarkan nisbah yang disepakati.
- 3). Variasai jenis simpanan yang berakad mudarabah ini dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi, misalnya :
 - a). Simpanan Idul Fitri
 - b). Simpanan Idul Qurban
 - c). Simpanan Haji
 - d). Simpanan Pendidikan
 - e). Simpanan Kesehatan, dll

Secara garis besar simpanan mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu: mudarabah mutlaqoh dan mudarabah muqayyadah.

1) Mudarabah Mutlaqoh

Sahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudarib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Produk BMT yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito.

2) Mudarabah Muqayyadah

Shahibul maal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudarib* hanya bisa mengelola dana

tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *sahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.

Dengan demikian produk simpanan wadi'ah dan mudarabah tersebut sumber dananya berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota dalam bentuk simpanan, deposito maupun bentuk-bentuk hutang yang lain, menggalang kerja sama dengan bank syariah maupun antar BMT sendiri.

b. Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT adalah

- 1) Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil yaitu pembiayaan berakad jual beli dengan menggunakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal untuk usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh

peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

- 2) Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan berakad jual beli dengan menggunakan prinsip seperti pembiayaan bai'u bitsaman ajil tetapi proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- 3) Pembiayaan Mudarabah yaitu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota di mana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.
- 4) Pembiayaan Musyarakah yaitu penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha dengan resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- 5) Pembiayaan Al-Qordul Hasan yaitu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini.

Secara umum produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi menjadi empat prinsip adalah sebagai berikut :

1) Prinsip Bagi Hasil

Pada dasarnya bagi hasil merupakan produk inti BMT karena bagi hasil mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil BMT akan ikut menanggung hasil

keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya. Setelah terjadi akad pembiayaan tersebut, BMT masih punya tanggung jawab lainnya. Jika dilihat dari sisi administratif sistem ini memang terasa rumit dan sulit, tetapi dari sisi keadilan bagi hasil menjadi sangat penting.

Sistem bagi hasil dalam BMT dapat diterapkan dengan empat model yaitu : mudarabah, musyarakah, muzara'ah-mukhabarah (sektor pertanian), musaqah (sektor perkebunan).

2) Prinsip Jual Beli

Produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada umumnya dalam BMT, akad jual beli yang sering dipakai ada tiga akad yaitu : Bai' Al Murabahah, Bai'al Salam, Bai'al Istishna'.

3) Prinsip Sewa

Sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Pada umumnya di BMT akad ijarah atau sewa dikembangkan ke dalam bentuk akad ijarah muntahiya bit tamlik yaitu akad sewa yang diakhiri dengan jual beli.

4) Prinsip Jasa

Produk layanan jasa ini bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan tersebut meliputi.

- a). Al wakalah yaitu wakil atau pendelegasian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
- b). Al kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab dari satu orang kepada orang lain.
- c). Al hawalah yaitu akad pengalihan hutang dari seseorang kepada orang lain yang sanggup menanggungnya.
- d). Ar-rahn yaitu akad untuk menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- e). Al qard yaitu bagian dari transaksi *ta'awuni* atau tolong menolong dan bukan komersial.
- f). Sumber dana al-qard dapat dibedakan menjadi dua :
 - 1). Dana yang berasal dari penyisihan modal BMT.
Dana ini hanya digunakan untuk pembiayaan sosial.
 - 2). Dana yang berasal dari zakat, infaq dan sadaqah.

Dengan demikian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan yang berupa penyediaan dana berupa uang dan barang dari pihak BMT kepada nasabah sesuai kesepakatan,

yang mewajibkan pihak penerima dana untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dengan didasari prinsip syariah.

E. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan bentuk LKM dapat berupa (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang (Wijoyo, 2005).

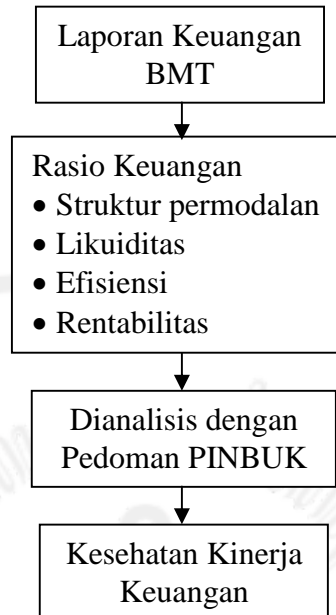
LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Maal wat Tanwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan grameen, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang melandaskan usahanya pada prinsip syariah yaitu tidak saja berorientasi pada bisnis tetapi juga sosial (Ridwan, 2004). Prinsip lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok masyarakat yang mengalami surplus dana dan kemudian mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana. Ada dua cara dalam menjalankan usahanya. Pertama menganut sistem bunga, artinya kepada setiap penyimpan diberikan bunga sebagai imbalan atas tabungannya dan kepada setiap peminjam juga dikenakan bunga sebagai balas jasa kepada pemilik dana. Kedua menganut sistem syariah (bagi hasil) yang sering disebut sistem islam. Dalam sistem syariah, insentif bagi setiap penyimpan diberikan dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari nisbah bagi hasil tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Bagi peminjam juga dikenakan sistem bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Situmorang:2007).

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berusaha menganalisis laporan keuangan BMT yang digambarkan dalam rasio keuangan berupa struktur permodalan, likuiditas, efisiensi dan rentabilitas. Rasio keuangan selanjutnya dianalisis dengan pedoman PINBUK untuk menggambarkan kesehatan kinerja keuangannya. Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

GAMBAR II.1
Kerangka teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah BMT yang tersebar di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar. BMT yang diteliti telah berbadan hukum di Dinas Koperasi dan UKM.

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT baik di Dinas Koperasi atau BMT yang bersangkutan. Laporan keuangan digunakan untuk mencari rasio keuangan BMT. Rasio keuangan kemudian dianalisis dengan pedoman PINBUK untuk mengetahui kesehatan kinerja keuangan BMT.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti dan paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Sekaran, 2000). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar.

Sampel adalah bagian atau anggota populasi (Sekaran, 2000). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 BMT diambil dengan metode *purposive sampling* dimana sampel yang dipilih didasarkan pada karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan. Kriteria sampel yang digunakan adalah

1. Memiliki badan hukum
2. Telah beroperasi minimal 1 tahun
3. Bersedia memberikan laporan keuangannya untuk dianalisis

C. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan laba rugi dan neraca tahun 2008. Data tersebut diperoleh dengan mendokumentasikan laporan keuangan yang ada dalam laporan rapat anggota tahunan BMT. Data laporan keuangan BMT di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM sedangkan data laporan keuangan BMT di wilayah Solo diperoleh langsung dari BMT yang menjadi sampel.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan rasio dari PINBUK yang terdiri dari:

1. Struktur Permodalan

Rumus :

$$\text{StrukturModal} = \frac{\text{TotalModal}}{\text{TotalSimpananSukarela}}$$

(Sumber : *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT PINBUK Tahun 1995*)

Modal BMT adalah sejumlah harta baik uang maupun barang yang dipercayakan sepenuhnya kepada BMT untuk dikelola/diusahakan dengan syarat tertentu yang disepakati bersama.

Total Modal terdiri dari :

- a. Simpanan Pokok Khusus
- b. Simpanan Pokok
- c. Simpanan wajib
- d. Simpanan Penyertaan
- e. Hibah
- f. Cadangan-cadangan
- g. Laba berjalan

Simpanan sukarela adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota sesuai dengan jenis dan ketentuannya.

Simpanan sukarela terdiri dari:

- a. Mudharobah biasa
- b. Mudharobah pendidikan
- c. Mudharobah idul fitri

d. Wadhiah

2. Likuiditas

Rumus :

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}}$$

(Sumber : Pedoman Penilaian Kesehatan BMT PINBUK Tahun 1995)

Pembiayaan adalah dana yang ditempatkan BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli dan perkongsian (syirkah). Pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT antara lain

- a. Pembiayaan Bai'u bitsaman Ajil
- b. Pembiayaan Murabahah
- c. Pembiayaan Mudarabah
- d. Pembiayaan Musyarakah
- e. Pembiayaan Al-Qordul Hasan

Sedangkan dana yang diterima BMT merupakan dana pihak ketiga yang terdiri dari :

- a. Modal
- b. Hutang pinjaman BMT dari pihak lain seperti BUMN, BPRS, BMI, BAZIS
- c. Simpanan Sukarela Anggota

Rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi likuiditas perusahaan adalah *current ratio* (rasio lancar) yaitu

perbandingan antara harta lancar dengan hutang lancar. Namun rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara pembiayaan dengan dana yang diterima. Sehingga dalam pembahasan masalah akan diperbandingkan rasio antara keduanya untuk melihat apakah kenaikan rasio yang digunakan PINBUK akan diikuti dengan kenaikan rasio lancar, sehingga rasio dapat mencerminkan kondisi likuiditas BMT secara keseluruhan.

3. Efisiensi

Rumus :

$$Efisiensi = \frac{BiayaOperasional}{PendapatanOperasional}$$

(Sumber : Pedoman Penilaian Kesehatan BMT PINBUK Tahun 1995)

Biaya operasional adalah biaya langsung berupa biaya bagi hasil simpanan anggota ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasi BMT seperti listrik, telepon, gaji pengelola dll sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan BMT yang berasal dari bagi hasil/*mark-up* pembiayaan anggota dan pendapatan lainnya

4. Rentabilitas

Rumus :

$$Rentabilitas = \frac{Laba}{TotalHarta}$$

(Sumber : Pedoman Penilaian Kesehatan BMT PINBUK Tahun 1995)

Laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban sedangkan total harta adalah semua jumlah kekayaan yang dimiliki BMT

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Pengujian statistik deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum dan mean dari masing-masing sampel. Angka mean (rata-rata) selanjutnya dinilai dengan standar PINBUK untuk mengetahui gambaran kesehatan kinerja keuangan BMT.

2. Analisis kinerja keuangan

Rasio keuangan dianalisis dengan menggunakan standar PINBUK lalu dikelompokkan menurut tingkat kesehatan kinerja keuangannya. Jumlah BMT masing-masing tingkat kesehatan selanjutnya diprosentasekan untuk melihat penyebaran BMT.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar selama tahun 2008. Data diperoleh dari Dinas Koperasi atau langsung dari BMT yang bersangkutan, dikarenakan laporan keuangan BMT tidak dipublikasikan untuk umum. Hasil survei menunjukkan terdapat 30 BMT yang dianalisis kinerja keuangannya. BMT ini tersebar di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pedoman penilaian kesehatan keuangan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). PINBUK adalah sebuah lembaga yang berpartisipasi dalam menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sejak didirikan tahun 1995 sampai sekarang, PINBUK masih berperan intensif sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap BMT yang telah maupun akan berdiri.

Pedoman penilaian kesehatan keuangan BMT perlu disusun karena sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi pengusaha kecil /mikro, BMT harus beroperasi dengan baik supaya dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah. Penilaian kesehatan BMT dalam penelitian ini

terdiri dari rasio struktur permodalan, likuiditas, efisiensi dan rentabilitas.

Data mengenai rasio keuangan dari 30 BMT dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.1
Data Rasio Keuangan BMT Wilayah
Sukoharjo, Solo dan Karanganyar
Tahun 2008

No	Struktur Permodalan	Likuiditas	Efisiensi	Rentabilitas
1	16.57	82.94	91.70	1.24
2	16.96	70.29	68.34	3.21
3	41.52	76.20	78.19	4.27
4	25.63	89.32	90.56	0.92
5	27.70	77.60	70.81	6.51
6	66.18	87.76	90.36	3.54
7	27.77	76.43	97.60	0.46
8	18.46	79.79	89.62	1.74
9	33.78	81.13	89.12	2.00
10	19.52	83.92	82.40	2.72
11	66.20	77.33	70.68	4.94
12	27.91	65.82	86.02	3.53
13	25.75	74.34	96.16	0.84
14	25.76	72.45	72.17	5.15
15	27.95	75.47	70.69	4.75
16	29.63	87.89	87.14	1.97
17	16.82	51.68	95.35	1.03
18	26.34	60.37	99.33	0.16
19	16.27	78.83	96.47	0.68
20	53.70	84.86	99.35	1.38
21	82.37	76.69	72.06	5.75
22	17.05	87.87	97.91	0.20
23	11.76	81.09	86.74	1.89
24	16.41	70.35	86.87	2.30
25	12.11	74.82	82.65	1.08
26	30.57	79.92	75.29	3.19
27	22.72	73.34	76.52	3.84
28	18.01	88.55	64.09	3.61
29	56.50	25.95	93.78	0.80
30	21.43	87.26	80.46	4.65

B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum dan mean dari masing-masing sampel. Berikut ini adalah statistik deskriptif data dari sampel penelitian

Tabel IV.2
Statistik Deskriptif Data

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
Struktur Permodalan	30	11.76	82.37	29.9783
Likuiditas	30	25.95	89.32	76.0087
Efisiensi	30	64.09	99.35	84.6143
Rentabilitas	30	.16	6.51	2.6117

Sumber: data sekunder yang diolah

Tabel IV.2 menunjukkan rata-rata struktur permodalan sebesar 29.9783 dengan nilai terendah sebesar 11.76 dan tertinggi sebesar 82.37. Rata-rata likuiditas 76.0087 dengan nilai terendah sebesar 25.95 dan tertinggi sebesar 89.32. Rata-rata efisiensi sebesar 84.6143 dengan nilai terendah sebesar 64.09 dan tertinggi sebesar 99.35. Rata-rata rentabilitas sebesar 2.6117 dengan nilai terendah sebesar 0.16 dan tertinggi sebesar 6.51.

C. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan dimaksudkan untuk memberikan gambaran penyebaran BMT berdasarkan kesehatan keuangannya. Penyebaran BMT dapat dilihat dari jumlah BMT atau prosentase untuk masing-masing tingkatan kesehatan keuangan. Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan BMT berdasarkan struktur permodalan, likuiditas, efisiensi dan rentabilitas

1. Struktur Permodalan

Rasio struktur permodalan BMT yang ditunjukkan dalam tabel IV.1 dapat dikelompokkan menurut standar yang dikeluarkan PINBUK sebagai berikut :

Tabel IV.3
Standar Struktur Permodalan BMT

<p>< 5% adalah sangat tidak sehat 6%-15% adalah kurang sehat 16%-25% adalah sehat >25% adalah sangat sehat</p>

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa terdapat 2 BMT yang struktur permodalannya kurang sehat dengan prosentase 6.67 %, 11 BMT yang struktur permodalannya sehat dengan prosentase 36.67 % dan 17 BMT yang struktur permodalannya sangat sehat dengan prosentase 56.67 %. Hasil ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.4
Penilaian BMT Sampel menurut Struktur Permodalan

No	Kesehatan Struktur Permodalan	Sebaran BMT	
		Jmh BMT	%
1	Sangat Tidak Sehat	0	-
2	Kurang Sehat	2	6.67
3	Sehat	11	36.67
4	Sangat Sehat	17	56.67
Jumlah		30	100

2. Likuiditas

Rasio likuiditas BMT yang ditunjukkan dalam tabel IV.1 dapat dikelompokkan menurut standar yang dikeluarkan PINBUK sebagai berikut :

Tabel IV.5
Standar Likuiditas BMT

<p><71% dan >94% adalah rendah 71-74% dan 91-94% adalah kurang 75-80% dan 86-90% adalah tinggi 81-85% adalah sangat tinggi</p>
--

Hasil penelitian lapangan menunjukkan terdapat 6 BMT yang likuiditasnya rendah dengan prosentase 20%, 3 BMT yang likuiditasnya kurang dengan prosentase 10%, 16 BMT yang likuiditasnya tinggi dengan prosentase 53.33 % serta 5 BMT yang likuiditasnya sangat tinggi dengan prosentase 16.67 %. Hasil ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.6
Penilaian BMT Sampel menurut Likuiditas

No	Likuiditas	Sebaran BMT	
		Jmh BMT	%
1	Rendah	6	20
2	Kurang	3	10
3	Tinggi	16	53.33
4	Sangat tinggi	5	16.67
Jumlah		30	100

3. Efisiensi

Rasio efisiensi BMT yang ditunjukkan dalam tabel IV.1 dapat dikelompokkan menurut standar yang dikeluarkan PINBUK sebagai berikut:

Tabel IV.7
Standar Efisiensi BMT

<p>> 90 % adalah rendah 76%-90% adalah kurang 60%-75% adalah tinggi < 60 % adalah sangat tinggi</p>

Hasil penelitian lapangan menunjukkan terdapat 11 BMT yang efisiensinya rendah dengan prosentase 36.67%, 10 BMT yang efisiensinya kurang dengan prosentase 33.33 % dan 9 BMT yang efisiensinya tinggi dengan prosentase 30 %. Hasil ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.8
Penilaian BMT Sampel menurut Efisiensi

No	Efisiensi	Sebaran BMT	
		Jmh BMT	%
1	Rendah	11	36.67
2	Kurang	10	33.33
3	Tinggi	9	30
4	Sangat Tinggi	0	0
Jumlah		30	100

4. Rentabilitas

Rasio rentabilitas BMT yang ditunjukkan dalam tabel IV.1 dapat dikelompokkan menurut standar yang dikeluarkan PINBUK sebagai berikut:

Tabel IV.9
Standar Rentabilitas BMT

<p>< 1% adalah a rendah 1-1,9% adalah kurang 2%-3% adalah tinggi > 3% adalah sangat tinggi</p>

Hasil penelitian lapangan menunjukkan terdapat 7 BMT yang rentabilitasnya rendah dengan prosentase 23.33 %, 7 BMT yang rentabilitasnya kurang dengan prosentase 23.33 %, 3 BMT yang rentabilitasnya tinggi dengan prosentase 10 % dan 13 BMT yang rentabilitasnya sangat tinggi dengan prosentase 43.33 %. Hasil ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.10
Penilaian BMT Sampel menurut Rentabilitas

No	Rentabilitas	Sebaran BMT	
		Jmh BMT	%
1	Rendah	7	23.33
2	Kurang	7	23.33
3	Tinggi	3	10
4	Sangat Tinggi	13	43.33
Jumlah		30	100

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini menggambarkan penilaian kinerja keuangan BMT yang didasarkan pada dua aspek yaitu

1. Nilai rata-rata dalam statistik deskriptif

Nilai rata-rata diperoleh dari nilai mean dalam statistik deskriptif. Nilai ini selanjutnya dianalisis dengan standar PINBUK untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangannya. Penilaian berdasarkan nilai rata-rata dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.11
Penilaian Rata-rata Kinerja Keuangan BMT
di Sukoharjo, Solo dan Karanganyar
Berdasarkan Standar PINBUK

Kinerja Keuangan	Rata-rata	Standar	Nilai
Struktur permodalan	29.9783	> 25	Sangat sehat
Likuiditas	76.0087	75-80 dan 86-90	Tinggi
Efisiensi	84.6143	76-90	Kurang
Rentabilitas	2.6117	2-3	Tinggi

2. Prosentase terbesar dalam analisis kinerja keuangan

Prosentase terbesar dalam analisis kinerja keuangan dapat menunjukkan penyebaran BMT dengan jumlah terbanyak berdasarkan

tingkat kesehatan keuangannya. Penilaian berdasarkan prosentase terbesar dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel IV.12
Penilaian Prosentase Terbesar Kinerja Keuangan BMT
di Sukoharjo, Solo dan Karanganyar
Berdasarkan Standar PINBUK

Kinerja Keuangan	Standar	Nilai	Jumlah	Prosentase
Struktur permodalan	> 25	Sangat sehat	17	56.67
Likuiditas	75-80 dan 86-90	Tinggi	16	53.33
Efisiensi	>90	Rendah	11	36.67
Rentabilitas	>3	Sangat tinggi	13	43.33

1. Struktur Permodalan

Hasil penilaian rata-rata dalam tabel IV.11 menunjukkan struktur permodalan BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar berada pada tingkat struktur permodalan yang sangat sehat. Hasil ini diperoleh karena BMT memiliki nilai rata-rata 29.9783. Nilai ini memenuhi standar dari PINBUK yang menyatakan BMT dengan struktur permodalan lebih besar dari angka 25 digolongkan sangat sehat. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Situmorang (2007) yang menyimpulkan BMT yang ada di provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan memiliki struktur permodalan yang sangat sehat.

Hasil penilaian prosentase terbesar dalam tabel IV.12 juga menunjukkan jumlah penyebaran BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar terbanyak berada pada tingkat struktur permodalan BMT yang sangat sehat. Analisis struktur permodalan dengan standar PINBUK dalam tabel IV.4 menunjukkan dari 30 BMT yang diteliti

terdapat 56.67% BMT yang struktur permodalannya sangat sehat, 36.67 % BMT yang struktur permodalannya sehat, sisanya 6.67 % BMT yang struktur permodalannya kurang sehat. Hasil penilaian prosentase ini juga sesuai dengan penilaian prosentase dalam penelitian Situmorang (2007) yang menyatakan prosentase terbesar BMT berada pada tingkatan struktur permodalan yang sangat sehat. Hasil analisis penelitian situmorang (2007) menunjukkan dari 63 BMT yang diteliti terdapat 74% BMT yang struktur permodalannya sangat sehat, 8% BMT yang struktur permodalannya sehat, 13% BMT yang struktur permodalannya kurang sehat dan 5% BMT yang struktur permodalannya sangat tidak sehat.

Dari pembahasan di atas diperoleh hasil bahwa berdasarkan standar PINBUK, struktur permodalan sebagian besar BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar berada pada tingkatan yang sangat sehat, baik berdasarkan nilai rata-rata maupun prosentase terbesar. Ini berarti BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar rata-rata memiliki tingkat struktur permodalan yang sangat sehat dengan penyebaran BMT terbanyak pada tingkat struktur permodalan yang sangat sehat pula. Semakin tinggi rasio struktur permodalan BMT maka semakin kuat kemampuan BMT dalam mengatasi penarikan dana segera sehingga tingkat keamanan dana anggota semakin terjamin.

2. Likuiditas

Hasil penilaian rata-rata dalam tabel IV.11 menunjukkan likuiditas BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar berada pada tingkat likuiditas yang tinggi. Hasil ini diperoleh karena BMT memiliki nilai rata-rata 76.0087. Nilai ini memenuhi standar dari PINBUK yang menyatakan BMT dengan angka likuiditas antara 75 sampai 80 dan 86 sampai 90 digolongkan memiliki likuiditas yang tinggi. Hasil ini berbeda dengan penelitian Situmorang (2007) yang menyimpulkan BMT yang ada di provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan memiliki likuiditas yang sangat tinggi.

Hasil penilaian prosentase terbesar dalam tabel IV.12 juga menunjukkan jumlah penyebaran BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar terbanyak berada pada tingkat likuiditas BMT yang tinggi. Analisis likuiditas dengan standar PINBUK dalam tabel IV.6 menunjukkan dari 30 BMT yang diteliti terdapat 16.67% BMT yang likuiditasnya sangat tinggi, 53.33% BMT yang likuiditasnya tinggi, 10% BMT yang likuiditasnya kurang dan 20% BMT yang likuiditasnya rendah. Hasil penilaian prosentase ini berbeda dengan penilaian prosentase dalam penelitian Situmorang (2007) yang menyatakan prosentase terbesar BMT berada pada tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Hasil analisis penelitian Situmorang (2007) menunjukkan dari 53 BMT yang diteliti terdapat 47% BMT yang

likuiditasnya sangat tinggi, 25% BMT yang likuiditasnya tinggi, 17% BMT yang likuiditasnya kurang dan sisanya 11% BMT yang likuiditasnya rendah.

Hasil pembahasan di atas didasarkan pada rasio PINBUK yang membandingkan antara pembiayaan dengan dana yang diterima. Pembahasan selanjutnya akan membandingkan rasio PINBUK dengan rasio lancar yang sudah umum digunakan dalam menilai likuiditas. Rasio lancar membandingkan antara harta lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan BMT untuk membayar hutang lancar dengan menggunakan harta lancar yang dimiliki. Semakin tinggi rasio lancar berarti BMT memiliki lebih banyak harta yang likuid untuk menjamin hutang lancarnya. Hasil perbandingan ini akan digunakan untuk melihat apakah semakin tinggi rasio PINBUK akan semakin tinggi pula rasio lancar karena keduanya sama-sama menilai likuiditas BMT.

Tabel IV.13
Perbandingan Rasio Likuiditas antara
Rasio PINBUK dengan Rasio Lancar

No	Rasio PINBUK	Penilaian PINBUK	Rasio Lancar
1	25.95	Rendah	118.19
2	51.68	Rendah	116.67
3	60.37	Rendah	106.17
4	65.82	Rendah	103.91
5	70.29	Rendah	114.47
6	70.35	Rendah	119.88
7	72.45	Kurang	121.70
8	73.34	Kurang	209.19
9	74.34	Kurang	123.65
10	74.82	Tinggi	110.60
11	75.47	Tinggi	129.53
12	76.20	Tinggi	130.65
13	76.43	Tinggi	162.74
14	76.69	Tinggi	684.49
15	77.33	Tinggi	149.58
16	77.60	Tinggi	141.09
17	78.83	Tinggi	101.79
18	79.79	Tinggi	126.49
19	79.92	Tinggi	245.24
20	81.09	Sangat Tinggi	106.69
21	81.13	Sangat Tinggi	157.32
22	82.94	Sangat Tinggi	183.15
23	83.92	Sangat Tinggi	117.71
24	84.86	Sangat Tinggi	186.50
25	87.26	Tinggi	128.43
26	87.76	Tinggi	327.22
27	87.87	Tinggi	135.99
28	87.89	Tinggi	129.38
29	88.55	Tinggi	471.35
30	89.32	Tinggi	196.24

Tabel IV.13 menggambarkan kenaikan rasio PINBUK tidak secara konsisten diikuti dengan kenaikan rasio lancar. Rasio lancar berfluktuasi naik turun dalam setiap kelompok penilaian PINBUK. Dari tabel di atas digambarkan sebagian besar BMT memiliki penilaian

likuiditas tinggi menurut PINBUK. Penilaian ini berarti pembiayaan yang didistribusikan kepada anggota dapat memenuhi permintaan anggota lain yang ingin menarik dananya. Namun jika dilihat dari hasil perbandingan dengan rasio lancar, semakin tinggi rasio dan penilaian PINBUK tidak diikuti dengan semakin tingginya rasio lancar secara konsisten. Padahal rasio lancar yang semakin tinggi dapat menunjukkan bahwa BMT memiliki likuiditas yang lebih baik dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga BMT yang menurut penilaian PINBUK memiliki likuiditas tinggi belum tentu likuiditas menurut rasio lancar menunjukkan nilai yang tinggi juga.

Perbedaan ini dikarenakan dalam penghitungan rasio, PINBUK menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya sehingga dalam penilaian, PINBUK lebih menekankan bagaimana kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan secara tepat agar mampu mengimbangi penarikan dana anggota. Sedangkan rasio lancar menggunakan aktiva lancar termasuk di dalamnya pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya, sehingga penilaian BMT diukur dari sejauh mana BMT mampu memenuhi kewajiban kepada anggota dengan menggunakan seluruh sumber likuiditas yang dimiliki. Sebagai alat yang digunakan untuk menilai likuiditas, rasio harus menggambarkan kondisi likuiditas secara keseluruhan bukan hanya sebagian saja. Rasio lancar lebih menggambarkan kemampuan likuiditas BMT secara

keseluruhan sedangkan rasio PINBUK hanya menggambarkan likuiditas dari pembiayaan saja.

Dari pembahasan di atas diperoleh hasil bahwa berdasarkan standar PINBUK, likuiditas sebagian besar BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar berada pada tingkat yang tinggi, baik berdasarkan nilai rata-rata maupun prosentase terbesar. Penilaian ini hanya melihat likuiditas BMT dari sisi pembiayaan yang diberikan saja tetapi belum menggambarkan likuiditas secara keseluruhan.

3. Efisiensi

Hasil penilaian rata-rata dalam tabel IV.11 menunjukkan efisiensi BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar berada pada tingkat efisiensi yang kurang. Hasil ini diperoleh karena BMT memiliki nilai rata-rata 84,6143. Nilai ini memenuhi standar dari PINBUK yang menyatakan BMT dengan angka efisiensi antara 76 sampai 90 digolongkan memiliki tingkat efisiensi yang kurang. Hasil ini sesuai dengan penelitian Situmorang (2007) yang menyimpulkan BMT yang ada di provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan memiliki tingkat efisiensi yang kurang.

Hasil penilaian prosentase terbesar dalam tabel IV.12 menunjukkan hasil yang berbeda dengan penilaian rata-rata. Penilaian prosentase terbesar menunjukkan BMT berada pada tingkat efisiensi yang rendah sedangkan menurut penilaian rata-rata, BMT berada pada

tingkat efisiensi yang kurang. Perbedaan ini dikarenakan nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan rasio efisiensi dari semua BMT kemudian membaginya dengan jumlah BMT yang menjadi sampel sehingga nilai rata-rata dipengaruhi oleh seluruh sampel yang ada. Sedangkan dalam penilaian prosentase, rasio efisiensi dari masing-masing BMT hanya dikelompokkan berdasarkan standar PINBUK sehingga nilainya tidak dipengaruhi sampel secara keseluruhan tetapi dipengaruhi oleh sampel yang berada pada masing-masing kelompok tersebut. Analisis efisiensi dengan standar PINBUK dalam tabel IV.8 menunjukkan dari 30 BMT yang diteliti terdapat 30 % BMT yang efisiensinya tinggi, 33.33 % BMT yang efisiensinya kurang dan 36.67 % BMT yang efisiensinya rendah. Hasil penilaian prosentase penelitian ini juga berbeda dengan penilaian prosentase dalam penelitian Situmorang (2007) yang menyatakan prosentase terbesar BMT berada pada tingkat efisiensi yang kurang. Hasil analisis penelitian Situmorang (2007) menunjukkan dari 67 BMT yang diteliti terdapat 30% BMT yang efisiensinya sangat tinggi, 15% BMT yang efisiensinya tinggi, 31% BMT efisiensinya kurang dan 20% BMT yang efisiensinya rendah.

Dari pembahasan di atas diperoleh hasil bahwa berdasarkan standar PINBUK, penilaian rata-rata menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang sedangkan dalam penilaian prosentase menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah. Ini berarti BMT di wilayah Sukoharjo,

Solo dan Karanganyar rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang kurang namun penyebaran BMT terbanyak berada pada tingkat efisiensi yang rendah. Semakin besar rasio efisiensi berarti semakin tidak efisien BMT dalam mengendalikan biaya operasionalnya.

4. Rentabilitas

Hasil penilaian rata-rata dalam tabel IV.11 menunjukkan rentabilitas BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar berada pada tingkat rentabilitas yang tinggi. Hasil ini diperoleh karena BMT memiliki nilai rata-rata 2.6117. Nilai ini memenuhi standar dari PINBUK yang menyatakan BMT dengan angka rentabilitas antara 2 sampai 3 digolongkan memiliki rentabilitas yang tinggi. Hasil ini berbeda dengan penelitian Situmorang (2007) yang menyimpulkan BMT yang ada di provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan memiliki rentabilitas yang sangat tinggi.

Hasil penilaian prosentase terbesar dalam tabel IV.12 menunjukkan hasil yang berbeda dengan penilaian rata-rata. Penilaian prosentase terbesar menunjukkan BMT berada pada tingkat rentabilitas yang sangat tinggi sedangkan menurut penilaian rata-rata, BMT berada pada tingkat rentabilitas yang tinggi. Perbedaan ini dikarenakan nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan rasio rentabilitas dari semua BMT kemudian membaginya dengan jumlah BMT yang menjadi sampel sehingga nilai rata-rata dipengaruhi oleh seluruh sampel yang

ada. Sedangkan dalam penilaian prosentase, rasio rentabilitas dari masing-masing BMT hanya dikelompokkan berdasarkan standar PINBUK sehingga nilainya tidak dipengaruhi sampel secara keseluruhan tetapi dipengaruhi oleh sampel yang berada pada masing-masing kelompok tersebut. Analisis rentabilitas dengan standar PINBUK dalam tabel IV.10 menunjukkan dari 30 BMT yang diteliti terdapat 43.33 % BMT yang rentabilitasnya sangat tinggi, 10 % BMT yang rentabilitasnya tinggi, 23.33 % BMT yang rentabilitasnya kurang dan 23.33 % BMT yang rentabilitasnya rendah. Hasil penilaian prosentase penelitian ini sesuai dengan penilaian prosentase dalam penelitian Situmorang (2007) yang menyatakan prosentase terbesar BMT berada pada tingkat rentabilitas yang sangat tinggi. Hasil analisis penelitian Situmorang (2007) menunjukkan dari 59 BMT yang diteliti terdapat 73% BMT yang rentabilitasnya sangat tinggi, 10% BMT yang rentabilitasnya tinggi, 3% BMT yang rentabilitasnya kurang dan 14% BMT yang rentabilitasnya rendah.

Dari pembahasan di atas diperoleh hasil bahwa berdasarkan standar PINBUK, penilaian rata-rata menunjukkan tingkat rentabilitas yang tinggi sedangkan dalam penilaian prosentase menunjukkan tingkat rentabilitas yang sangat tinggi. Ini berarti BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar rata-rata memiliki tingkat rentabilitas yang tinggi namun penyebaran BMT terbanyak berada pada tingkat rentabilitas yang sangat tinggi. Semakin besar rasio rentabilitas berarti

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BMT dan semakin baik pula posisi BMT dalam penggunaan aset.

Hasil penelitian mengenai penilaian kinerja keuangan BMT yang diuraikan di atas dapat dibandingkan sebagai berikut:

Tabel IV.14
Perbandingan Penilaian Kinerja Keuangan BMT
Berdasarkan Nilai Rata-Rata, Prosentase
dan Penelitian Terdahulu

Kinerja yang di Analisis	Penilaian Rata-Rata		Penilaian Prosentase Terbesar			
			Penelitian Sekarang		Penelitian Terdahulu	
	Angka rata-rata	Nilai	Jumlah BMT dalam %	Nilai	Jumlah BMT dalam %	Nilai
Struktur Permodalan	29.9783	<i>Sangat sehat</i>	56.67	<i>Sangat sehat</i>	74	<i>Sangat sehat</i>
Likuiditas	76.0087	<i>Tinggi</i>	53.33	<i>Tinggi</i>	47	<i>Sangat tinggi</i>
Efisiensi	84.6143	<i>Kurang</i>	36.67	<i>Rendah</i>	31	<i>Kurang</i>
Rentabilitas	2.6117	<i>Tinggi</i>	43.33	<i>Sangat tinggi</i>	73	<i>Sangat tinggi</i>

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis di atas mengidentifikasi beberapa temuan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja keuangan yang didasarkan pada standar PINBUK menggambarkan BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar jika dilihat dari rata-rata menunjukkan struktur permodalan yang sangat sehat, likuiditas yang tinggi, efisiensi yang kurang dan rentabilitas yang sangat tinggi. Sedangkan jika dilihat dari prosentase terbesar penyebaran, BMT memiliki struktur permodalan yang sangat sehat, likuiditas yang tinggi, efisiensi yang rendah dan rentabilitas yang sangat tinggi.
2. Menurut standar PINBUK, BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar, rata-rata memiliki tingkat struktur permodalan yang sangat sehat dengan penyebaran BMT terbanyak pada tingkat struktur permodalan yang sangat sehat pula. Semakin kuat kemampuan modal BMT dalam mengatasi penarikan dana segera, maka semakin sehat struktur permodalannya sehingga tingkat keamanan dana anggota semakin terjamin.
3. Menurut standar PINBUK, BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar, rata-rata memiliki tingkat likuiditas yang tinggi

dengan penyebaran BMT terbanyak pada tingkat likuiditas yang tinggi pula. Penilaian ini hanya melihat likuiditas BMT dari sisi pembiayaan saja yaitu bagaimana BMT memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan pembiayaan yang diberikan, tetapi belum menggambarkan likuiditas secara keseluruhan seperti yang digambarkan oleh rasio lancar.

4. Menurut standar PINBUK, BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar, rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang kurang. Tetapi jika dilihat dari penyebarannya, BMT terbanyak berada pada tingkat efisiensi yang rendah. BMT dianggap efisien apabila mampu mengendalikan biaya operasional seminimal mungkin dalam rangka menghasilkan pendapatan. Semakin besar rasio efisiensi berarti semakin tidak efisien BMT dalam mengendalikan biaya operasionalnya.
5. Menurut standar PINBUK, BMT yang ada di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar, rata-rata memiliki tingkat rentabilitas yang tinggi. Tetapi jika dilihat dari penyebarannya, BMT terbanyak berada pada tingkat rentabilitas yang sangat tinggi. Semakin besar rasio rentabilitas berarti semakin besar pula tingkat laba yang dicapai BMT dan semakin baik pula posisi BMT dalam penggunaan aset.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut

1. Penelitian ini belum memasukkan indikator penilaian kesehatan kualitas aktiva produktif BMT dikarenakan pembiayaan bermasalah

yang merupakan komponen utama dalam indikator tidak dicantumkan dalam laporan keuangan.

2. Sampel berjumlah 30 BMT dan hanya meliputi BMT di wilayah Sukoharjo, Solo dan Karanganyar
3. Periode waktu yang digunakan hanya 1 tahun yaitu tahun 2008

C. Saran

Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah :

1. BMT perlu memperbaiki efisiensi usahanya dengan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan biaya untuk kegiatan operasional. Karena berdasarkan penilaian standar PINBUK, BMT memiliki tingkat efisiensi yang kurang secara rata-rata dan rendah menurut penyebaran terbanyaknya.
2. Pemerintah terutama Dinas Koperasi dan UKM serta organisasi pendamping BMT seperti PINBUK, PKES, ABSINDO, Dompot Duafa, dll sebaiknya melakukan pendampingan dan pemantauan yang lebih serius terhadap perkembangan kinerja BMT dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi BMT.
3. Rasio likuiditas yang digunakan PINBUK hanya menekankan pada pembiayaan sebagai alat untuk memenuhi kewajiban lancar. Rasio sebagai alat untuk menilai likuiditas harus menggambarkan kondisi likuiditas secara keseluruhan bukan hanya sebagian saja. Maka dari itu, bagi PINBUK dan penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah

rasio likuiditas dengan rasio lain seperti *current ratio*, *quick ratio*, *cash ratio*, dll sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat.

4. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk menambah sampel, memperluas wilayah, memperpanjang waktu pengamatan serta menambah indikator penelitian dengan kualitas aktiva produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar, Agus Widarjono, M Bekti Hendrianto. 2003. *Study On Factor Influencing Performance Of The Best Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) In Indonesia*. Iqtisad Journal Of Islamic Economics. Volume 4 no 1
- Astuti, Evy Meirina Budi 2007. *Evaluasi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari BMT Beringharjo, Kauman, Yogyakarta*. Skripsi UII.
- Aziz, M Amin. 2006. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).
- Aziz, M Amin. 2006. *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).
- Mualim, Amir dan Zainal Abidin. 2005. *Profesionalisme Praktisi BMT Di 1 Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman*. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII). Millah Vol. IV, No. 2
- Muljono, Teguh Pudjo. 1996. *Bank Budgeting-Profit Planning and Control*. Yogyakarta. BPFE. Edisi Pertama
- Munawir. 2004. *"Analisa Laporan Keuangan"*. Yogyakarta:Liberty
- Rahmawati, Isna. 2008. *Analisis Komparasi Kinerja Keuangan antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesiaperiode 1999-2001*. Skripsi STAIN
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business*. 4th Edition. New York: John-Wiley&Sons Inc.
- Situmorang. Jannes. 2007. *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. www.smecta.com/kajian/files/jurnal
- Sugeng, Bambang. 2007. *Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Persepsi Hukum Kontrak dan Fiqih)*. Tesis UII
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. ISES Yogyakarta. Cetakan pertama

Sucipto. 2003. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Digital library Universitas Sumatra Utara

Wardoyo. Hendro Prabowo. 2005. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek*. Seminar Nasional PESAT. Universitas Gunadarma.

Wijoyo. Wiloejo Wirjo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisis Khusus November

_____ *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*. PINBUK, Jakarta.

_____ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil (BMT)

<http://najmudincianjur.blogspot.com>

www.google.com

